



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZULKIPLI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 676784

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 41.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 12A1CF MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 246.350.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 105.970.147

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.193.320.147

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.193.320.147

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.